

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, propaganda merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari masa itu, dan propaganda dijadikan sebagai upaya untuk menarik kerja sama dengan rakyat dan juga sebagai upaya Jepang untuk meredam perlawanan rakyat. Propaganda dijadikan sebagai instrumen penting dalam upaya perang Jepang dan hampir di semua wilayah yang diduduki oleh Jepang. Untuk dapat menguasai Indonesia, Jepang memiliki dua asas penting yakni bagaimana menarik hati rakyat menjinakkan mereka dapat memobilisasi seluruh rakyat untuk kepentingan perang Jepang (Putri, 2018:17).

Pada era penjajahan Jepang, di Indonesia terdapat tiga pemerintahan militer yaitu (1) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, (2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta, (3) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makasar (Djoened Marwati, 1984:5).

Setelah pemerintah militer Jepang terbentuk secara resmi, pemerintah militer Jepang di Jawa segera mengendalikan sarana-sarana penerangan untuk publik. Siaran radio, film dan pers ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Pengawasan dan penyebarluasan propaganda dilakukan oleh balatentara Jepang, yang diorganisasikan dalam suatu lembaga Sendenhan, yang

kemudian menjadi Syoohoobu (Seksi Propaganda pemerintahan Militer) (Zorab, dalam Dewi Yuliati, 2010:10).

Dalam bulan Agustus 1942, dibentuk Departemen Propaganda (Sendenbu) dalam lingkup badan Pemerintahan Militer (Gunseikanbu). Departemen Propaganda ini bertanggung jawab atas propaganda dan informasi yang menyangkut pemerintahan sipil, dan merupakan departemen yang terpisah dari Seksi Propaganda Pemerintahan Militer, yang bertanggungjawab atas informasi mengenai operasi militer. Kegiatan Sendenbu ditujukan kepada penduduk sipil di Jawa, meliputi orang Indonesia, Indo-Eropa, minoritas Asia, dan Jepang, sedangkan Seksi Penerbangan Angkatan Darat ke-16 melaksanakan propaganda bagi tentara Jepang, tawanan perang, dan warga negara musuh melalui siaran luar negeri (Aiko Kurasawa, dalam Dewi Yuliati, 2010:10).

Walaupun aktivitas Sendenbu terbatas pada urusan sipil, Pemerintah Militer Jepang tidak mempercayakan kepemimpinan departemen ini kepada orang sipil, melainkan selalu dipegang oleh perwira angkatan darat yaitu Kolonel Machida (Agustus 1942–Oktober 1943), Mayor Adachi (Oktober 1943–Maret 1945), dan Kolonel Takahashi (April–Agustus 1945). Sendenbu memiliki tiga seksi yaitu Seksi Administrasi, Seksi Berita dan Pers, serta Seksi Propaganda. Dari ketiga seksi ini, hanya Seksi Propaganda yang dipimpin oleh seorang sipil, sedangkan dua seksi lainnya dipimpin oleh perwira militer dengan pangkat letnan atau letnan dua (Aiko Kurasawa, dalam Dewi Yuliati, 2010:10).

Semula Sendenbu melaksanakan propaganda secara langsung, tetapi ketika struktur pemerintahan militer semakin rumit, dibentuk pula badan-badan

propaganda, dan di setiap pemerintahan daerah dibentuk dinas propaganda (Zorab, dalam Dewi Yuliati, 2010:11).

Pada bulan April 1943 dibentuk pula sebuah organisasi pembantu sendenbu yang bernama Keimin Bunkha Shidôsho atau Pusat Kebudayaan. Tugas organisasi ini adalah mempromosikan kesenian tradisional Indonesia, memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang, mendidik dan melatih seniman Indonesia. Keimin Bunkha Shidôsho dikepalai oleh direktur Sendenbu dan memiliki lima seksi, yang masing-masing dipimpin oleh orang Indonesia. Kelima seksi itu adalah seksi administrasi, sastra, musik, seni rupa, dan seni teater, tari, film. Dalam setiap seksi ditempatkan staf ahli Indonesia (penulis, penyair, penggubah lagu, pematung, penulis scenario, sutradara film, dsb.), dan mereka dilatih oleh instruktur Jepang yang dikirim oleh Sendenbu (Aiko Kurasawa, dalam Dewi Yuliati, 2010:11).

Asal-usul kata propaganda sulit ditentukan secara pasti, tetapi ada suatu sumber yang menyatakan bahwa kata itu mulai digunakan pada tahun 1622, ketika Paus Gregory XV mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Congregatiode Propaganda Fide. Organisasi itu bertugas untuk menyebarkan agama Kristen Katholik di kalangan masyarakat non-Kristen. Dalam konteks pengertian ini, propaganda diartikan sebagai organisasi yang mengirimkan pesan-pesan. Setelah tahun 1622 propaganda tidak hanya diartikan sebagai organisasi, tetapi juga sebagai pesan yang disebarkan oleh organisasi. Dalam perkembangan, pengertian propaganda juga berkaitan dengan teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan, sebagai contoh iklan, film dan televisi (James E.Combs dan Dimmo, dalam Dewi Yuliati, 2010:1).

Berdasarkan tujuannya, propaganda juga diartikan sebagai komunikasi yang ditujukan untuk menyebarkan tujuan yang diinginkan (sering bersifat subversif dan jahat) terhadap para pemirsa, dan dilakukan dengan cara-cara yang berpengaruh (James E.Combs dan Dimmo, dalam Dewi Yuliati, 2010:1). Pada umumnya propaganda yang memberikan issue-issue controversial lebih mudah diterima oleh masyarakat (Robert K.Merton, dalam Dewi Yuliati, 2010:2). Berdasarkan pada pengertian-pengertian ini, sistem propaganda dalam konteks kekuasaan Jepang di Indonesia mencakup organisasi, pesan, dan teknik penyampaian pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi bangsa Indonesia guna mendukung pencapaian tujuannya.

Dalam sistem pemerintahan Jepang di Indonesia, propaganda merupakan bagian penting dan integral. Suatu indikasi bahwa propaganda tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Jepang di Indonesia adalah pembentukan departemen propaganda (Sendenbu) di bawah pemerintah militer Jepang. Untuk menguasai Jawa, Jepang berpegang pada dua prinsip utama yaitu bagaimana menarik hati rakyat (*minshin ha'aku*) dan bagaimana mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka (*senbukosaku*). Prinsip ini perlu dilaksanakan untuk memobilisasi seluruh rakyat guna mendukung kepentingan perang dan untuk merubah mentalitas mereka secara keseluruhan. Berdasarkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia harus dibawa kepada pola tingkah laku dan berpikir Jepang, propaganda ditujukan untuk mengindoktrinasi bangsa ini agar dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya (Aiko Kurasawa, dalam Dewi Yuliati, 2010:2).

Propaganda memiliki arti penting bagi Jepang untuk menguasai wilayah

dan rakyat Indonesia, sehingga bangsa itu pun telah mempersiapkan sistem propaganda nya secara sistematis dan intensif sejak sebelum pelaksanaan invasi kenegeri ini. Sebagai sebuah badan yang bernaung dibawah struktur Ganseikanbu, Sendenbu yang merupakan organ utama pemerintah militer (Gunseikanbu) Jepang, dibentuk pada Agustus 1942 dan bertanggung jawab atas propaganda dan informasi yang menyangkut pemerintahan sipil. Pemerintah militer mendirikan Departemen Propaganda (Sendenbu) tujuannya agar masyarakat mau bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang atau untuk memobilisasi seluruh rakyat dalam berperang melawan Sekutu dan untuk dapat mengubah mentalitas. Hal ini disertai keyakinan bahwa bangsa Indonesia harus dibentuk berdasarkan pola perilaku dan pemikiran Jepang. Mereka mengarahkan propaganda pada indoktrinasi terhadap rakyat Indonesia sehingga mereka dapat menjadi kawan-kawan yang setia dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya

Ketika propaganda dilakukan, perfilman digunakan sebagai media propaganda Jepang dilakukan untuk lebih memudahkan infiltrasi untuk melaksanakan skema propaganda kedalam operasi dilakukan dengan berbagai bantuan alat-alat media. Penggunaan media melalui surat kabar, poster, foto, siaran radio, pameran, pamflet, seni pertunjukan tradisional, pertunjukan gambar kertas, musik, sandiwara, drama, dan film. Diantara media tersebut penggunaan film merupakan alat propaganda yang paling efektif.

Salah satu ciri utama propaganda Jepang dimasa perang ialah penggunaan berbagai media tersebut secara positif, terutama ditekankan kepada media yang mengusik “pendengaran dan penglihatan” (audiovisual) seseorang. Media audio visual ini dianggap paling efektif untuk mempengaruhi penduduk yang tidak

berpendidikan dan buta huruf serta haus hiburan.

Pada masa Jepang sendiri, film digunakan sebagai alat propaganda politik. Film mempunyai keunggulan dalam mengekspresikan gambar bergerak yang dapat dengan mudah dimengerti oleh penonton. Hal ini menyebabkan film dengan mudah mendapatkan banyak penggemar. Film merupakan salah satu media propaganda penting pada masa perang. Sebelum Perang Dunia Kedua, media ini tidak pernah digunakan sebagai alat indoktrinasi politik di Indonesia. Jepang merupakan satu-satunya negara yang memanfaatkan media film sebagai alat propaganda didalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

Ketika menguasai Indonesia, Jepang membuat program-program dan melaksanakan propaganda secara sistematis. Meskipun Jepang memerintah Indonesia secara militeris, rakyat Indonesia tetap bersedia untuk memberikan dukungan pada instruksi-instruksi Jepang melalui sarana propagandanya. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Mengapa Jepang menggunakan media film sebagai alat propaganda politik?
- 2) Bagaimana pelaksanaan propaganda Jepang melalui media film di Jawa dan Aceh?
- 3) Bagaimana respon masyarakat terhadap aksi propaganda Jepang melalui media film?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penyebab Jepang menggunakan media film sebagai alat propaganda politik.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan propaganda Jepang melalui media film di Jawa.
- 3) Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap aksi propaganda Jepang melalui media film.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian tentang Propaganda Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945 (studi kasus bidang perfilman) ialah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambahkan teori atau pengetahuan sekaligus referensi tentang Secara Objektif, penulisan ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu sejarah dalam bidang kebudayaan khususnya sejarah perfilman yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penulisan ini adalah Tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Samudra. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan tentang film nasional dan juga menjadi masukan yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya Melalui penelitian ini dapat menarik peneliti lain untuk ikut serta berpartisipasi mengenai propaganda yang dilakukan oleh Jepang melalui kesenian.